

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa proses penominasian perempuan dalam pemilihan calon gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada Partai Gerindra dan Golkar dapat dilihat melalui empat aspek yaitu penominasian kandidat, selektor, tempat pemilihan kandidat dan mekanisme penetapan kandidat. Mekanisme ini dipengaruhi oleh aturan pemilihan, pragmatisme politik partai politik dalam Pilkada dan aspek sosial serta kultural masyarakat yang disesuaikan Gerindra dan Golkar dalam proses penominasian terhadap bakal calon gubernur perempuan dalam pemilihan calon gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Gerindra melaksanakan proses penominasian bakal calon gubernur perempuan dalam pemilihan calon gubernur di Sumatera Barat Tahun 2020 bersifat eksklusif atau tertutup. Pertama, pada tahap penominasian kandidat. Gerindra sebagai partai yang memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan dapat mengusung calon sendiri dan menciptakan kriteria dalam menyeleksi bakal calon, diantaranya kader Gerindra, mempunyai popularitas, elektabilitas, dan pengalaman di jabatan yang sama (petahana), sedangkan finansial calon menjadi opsi tambahan. Bagi bakal calon gubernur perempuan mekanisme ini akan menguntungkan perempuan ketika dirinya kader Partai Gerindra karena menjadi prioritas. Kedua, selektor atau tim penyeleksi Gerindra hanya berasal dari internal Gerindra. Keterbatasan perempuan membangun jaringan dan kedekatan dengan selektor menjadi penyebab perempuan tidak mampu melewati proses penominasian di

Gerindra. Ketiga, dimana calon dipilih. Bakal calon di jaring dan disaring di daerah, akan tetapi hasil akhir tetap ditentukan pertimbangan DPP. Sentralisasi politik yang ada mempersempit kesempatan bagi perempuan yang telah meniti karir di Gerindra untuk dicalonkan sebagai gubernur. Keempat, bagaimana calon ditetapkan. Calon gubernur dipilih melalui penunjukan oleh DPP, meski adanya seleksi di DPD dan survei pemilih dalam bentuk voting tidak dapat menggantikan keputusan yang ditetapkan DPP.

Proses penominasian perempuan di Partai Golkar dalam menentukan calon gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 menggunakan jalur penjaringan DPD Golkar secara mandiri dan partai koalisi. Kedua mekanisme tersebut berjalan tertutup dan terbuka. Pertama, kandidat yang dinominasikan. Golkar menetapkan persyaratan khusus dalam penominasian calon seperti kader, pendanaan politik, kemampuan dan elektabilitas. Saat itu tidak ada kader perempuan Golkar yang ikut penjaringan, hanya ada non kader sehingga tidak dipilih sebagai calon dari Partai Golkar. Kedua, penyeleksi calon di Partai Golkar berasal dari kader Golkar dan partai koalisi. Di DPD Golkar Sumatera Barat penyeleksi dalam bentuk Tim Pilkada Partai Golkar Tahun 2020 yang mana telah membuka akses perempuan sebagai salah satu selektor. Ini juga menunjukkan dukungan Golkar terhadap perempuan di ranah politik, meski belum sebagai calon gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Ketiga, dimana calon diputuskan. Proses pemilihan calon dari Golkar bersifat terpusat di DPP, peran pengurus DPD dan Tim Pilkada pada dasarnya hanya pada tahap penjaringan, sementara putusan calon menjadi kewenangan DPP. Keempat, bagaimana calon dipilih. Golkar menetapkan calon melalui penunjukan yang berpedoman pada penjaringan dan seleksi serta hasil survei di DPD. Keputusan

akhir tetap berada di DPP, pengesahan terhadap suatu calon melalui surat keterangan atau rekomendasi. Penunjukan calon dalam Partai Golkar secara langsung memperkecil terpilihnya bakal calon gubernur perempuan sebagai calon, apalagi bukan berasal dari kader Golkar.

Berdasarkan hasil penelitian, dirangkum beberapa dinamika yang dihadapi perempuan dalam proses penominasian di internal partai politik. Pertama, adanya pragmatisme politik dalam pencalonan gubernur, orientasi suara dan mengejar kemenangan sehingga calon yang dianggap tidak potensial tidak dilirik termasuk bakal calon perempuan. Kedua, gagalnya kaderisasi partai terhadap perempuan dan terbatasnya penerapan kebijakan afirmasi di internal partai politik. Struktural partai politik mengutamakan laki-laki sebagai pengurus dan calon di jabatan politik. Ketiga, kuatnya oligarki dalam pencalonan perempuan dalam pemilihan gubernur. Seleksi bakal calon gubernur perempuan tidak mengedepankan kualitas dan program yang dibawa namun kekerabatan dan kedekatan dengan elit dan pengurus partai. Kemudian, terbatasnya pengaturan resmi dan mengikat partai politik dalam mencalonkan perempuan di Pilkada sehingga tidak ada keharusan merekrut calon perempuan. Keempat, jual beli pencalonan dengan biaya politik yang tinggi. Kelima, masyarakat dan partai yang masih belum sepenuhnya mempercayakan tampuk kepemimpinan pada perempuan, dengan beragam sudut pandang seperti agama, budaya dan sosial.

## 6. 2 SARAN

Merujuk hasil penelitian peneliti tentang proses penominasian perempuan dalam pemilihan calon gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada Partai Gerindra dan Golkar, yakni masih menjalankan proses pemilihan calon secara tertutup dan keputusan penetapan yang tersentralisasi, maka disarankan:

1. Partai politik harus menjalankan kaderisasi lebih aktif terhadap perempuan, karena masih banyak kader perempuan yang belum mendapatkan pendidikan politik dan menghindari keterbatasan kader perempuan potensial untuk terlibat dalam kontestasi politik.
2. Perempuan harus mengaktualisasi diri tidak hanya di partai politik, namun di tengah masyarakat pemilih untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan bersama laki-laki khususnya dalam pencalonan kepala daerah.
3. Penelitian ini hanya terfokus pada proses penominasian perempuan di dua partai politik yakni Gerindra dan Golkar di Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penelitian pada beberapa partai politik lainnya karena penominasian dalam pemilihan calon berbeda setiap partai terutama bagi perempuan.

